

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia. (2016). Polisi dan ormas bubarkan acara Lady Fast di Yogyakarta. Retrieved April 6<sup>th</sup> 2016 from *BBC Indonesia*: [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160403\\_indonesia\\_diskusi\\_perempuan\\_bubar\\_ormas](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160403_indonesia_diskusi_perempuan_bubar_ormas)
- Billiocta, Ya'cob. (2016, June 1<sup>st</sup>). Dituding Acara LGBT, Pameran Seni di Yogyakarta Digeruduk Ormas. Retrieved June 2<sup>nd</sup> 2016 from Merdeka.com : <http://www.merdeka.com/peristiwa/dituding-acara-lgbt-pameran-seni-di-yogyakarta-digeruduk-ormas.html>
- Darmadi, Damai; Sukidin., (2009). Administrasi Publik. Yogyakarta: LaksBang Pressindo Darwin, Muhadjir. (2004). *Teori Organisasi Publik (revisi 3)*, Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta.
- Fira, Untuk Obsession News. (2014). Kementerian Hukum dan HAM Berhak Bubarkan FPI. Retrieved April 5<sup>th</sup> 2016 from ObsessionNews, <https://obsessionnews.com/kementerian-hukum-dan-ham-berhak-bubarkan-fpi/>
- Gajduschek, Gyorgy. (2003). *BUREAUCRACY: IS IT EFFICIENT? IS IT NOT? IS THAT THE QUESTION? Uncertainty Reduction: An Ignored Element of Bureaucratic Rationality. Journal of ADMINISTRATION & SOCIETY, Vol. 34 No. 6, January 2003 700-723*
- Hanapiyah, Pipin. (2001). “Visi, Misi, dan Strategi Ormas dan LSM Dalam Pembangunan Daerah”, Makalah Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Ormas dan LSM, Bandung : Universitas Padjajaran Bandung, 26 September 2001
- Hasanah, Mahesti. (2015). *Ekonomi Politik Kolonialisme*. Yogyakarta: Polgov
- Himawan, Furqan Ulya. (2016, May 31<sup>st</sup>). Didesak Ormas, Polisi Ambil Lukisan di Galeri I AM Yogyakarta. Retrieved June 2<sup>nd</sup> 2016 from Media Indonesia: <http://www.mediaindonesia.com/news/read/48217/didesak-ormas-polisi-ambil-lukisan-di-galeri-i-am-yogyakarta/2016-05-31>

- IAM Project. (2016). Statement dan Kronologi Pembubaran Pameran Idola Remaja Nyeni. Retrieved June 1<sup>st</sup> 2016 from Official Facebook Account of IAM Project Yogyakarta
- Kabupaten Pati. (2012). Strategi Sanitasi Kabupaten Pati. Pati: Pemerintah Daerah Kabupaten Pati
- Kemenkumham, (2018). Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham sebagai Tindak Lanjut PerPPU nomor 2 tahun 2017. Retrieved Selasa, 22 Mei 2018 from <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaranpers/kewenanganlegaladministratifkemenkumhamsebagaiindaklanjutperppunomor2tahun2017>
- Kemkominfo, (2017). Pemerintah Keluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas, Retrieved August 9<sup>th</sup>, 2017 from : <https://kominform.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/art...>
- Keynes, John Maynard. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. Retrieved September 12<sup>th</sup> 2017 from <http://etext.library.adelaide.edu.au/k/k44g/k44g.zip>
- Koalisi Kebebasan Berserikat. (2015). Laporan Pemantauan tahun Kedua Implementasi UU Ormas (UU no. 17 tahun 2013). Jakarta: KKB
- Koalisi Kebebasan Berserikat. (2016). Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi UU Ormas tahun Ketiga. Jakarta: KKB
- Koalisi Kebebasan Berserikat. (2017). Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi UU Ormas tahun Keempat. Jakarta: KKB
- Kumorotomo, Wahyudi. (2008). Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada Masa Transisi. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dan Pustaka Pelajar
- Kusumasari, Bevaola. (2016). Implementasi Kebijakan Publik: Kinerja Implementasi Kebijakan. Pertemuan Kelima, March 29<sup>th</sup> 2016

- La Palombara, Joseph; Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin. Ed. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti; Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
- Laodengkowe, Ridaya. (2010). *Mengatur Masyarakat Sipil: Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia*. Depok : Kelompok Kerja Akuntabilitas OMS
- Local Assessment Team, (2010), “Domestic Review on NPO Sector in Indonesia.” Laporan Dokumen Review Domestik pada Ornop di Indonesia yang difasilitasi oleh PPATK & the Charity Commission for England and Wales
- Movanita, Ambaranie. (2016). Ini Penjelasan Polri soal Pembubaran Paksa Sejumlah Kegiatan. Retrieved April 6<sup>th</sup> 2016 from *Kompas.com* <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/06/16020391/Ini.Penjelasan.Polri.soal.Pembubaran.Paksa.Sejumlah.Kegiatan>
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo
- Nugroho, Budi. (2014). *FPMS Gugah Posisi dan Peran OMS*. Retrieved October 20<sup>th</sup>, 2017 from Konsil LSM Indonesia : <http://konsillsm.or.id/fpms-gugah-posisi-dan-peran-oms/>
- Nugroho, Eryanto. (2016). *Ormas dan Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 77 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*. (2015). Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*. (2017). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. (2016). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

*Peraturan Pemerintah 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.* (2016). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

*Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 16 tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.* (2006). Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia

*Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.* (2008). Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia

*Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.* (2009). Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia

*Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).* (2015). Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Prabowo, Hardian Relly (2018). *Upaya Forum Umat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Membangun Isu Bahaya Komunisme dan Kebangkitan PKI sebagai Masalah Publik*. Yogyakarta : Skripsi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM. Purwanto, Erwan Agus. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Ramdhani, Jabbar. (2018). *Fakta-fakta Pengesahan Pembubaran HTI oleh Pengadilan*. detikNews. Selasa 08 Mei 2018. Retrieved Selasa, 22 Mei 2018 from <https://news.detik.com/berita/4009977/fakta-fakta-pengesahan-pembubaran-hti-oleh-pengadilan>

Reed M, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn CH, dan Stringer LC. (2009). *Who's and why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management*. Journal of Environmental Management.

Roskin, Michael G., et al., (1974). *Political Science: An Introduction*. London: Pearson

Sahana, Munarsih. (2016). *VOA Indonesia: LBH Yogyakarta: Pembubaran Paksa Workshop 'Lady Fast' Langgar Hukum*. Retrieved April 6<sup>th</sup> 2016 from *VOA Indonesia* <http://www.voaindonesia.com/content/lbh-pembubaran-paksa-lady-fast-langgar-hukum-/3269115.html>

Santoso, Priyo Budi., (1993). *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (July 24<sup>th</sup> 2015). *Pengertian Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah*. Retrieved September 9<sup>th</sup> 2016 from <http://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/>

Subarsono, A.G. (2005) *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiarta, Eko. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Thesis*. Yogyakarta: Suaka Media

Sunaryo, Bambang. (2014). *Hak-Hak Sosial Politik dan Budaya untuk : Kebebasan Berpikir, Berpendapat, dan Berserikat di Indonesia*. Dalam Kumpulan Jurnal: *Manajemen Publik Kontemporer*. Yogyakarta : Gava Media

Sulistyaningsih, Endang. (2008). *Birokrasi dan Potensi Konflik di Indonesia*. Riau : Jurnal FISIP Universitas Riau Semester Gasal 2008 hlm. 100-109.

Syaefudin, Arif. (2017). *Mengungkap Apa Sebenarnya UN Swissindo*. detikNews. Jumat 25 Agustus 2017. Retrieved Selasa, 22 Mei 2018 from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3614656/mengungkap-apa-sebenarnya-un-swissindo>

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat*. (1945). Jakarta: Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI)

*Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. (1998). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

*Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* (1999). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

*Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.* (2002). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

*Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).* (2013). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Vicka, Patricia. (2016). Ormas Tak Berizin Deklarasikan Diri di Yogyakarta. MetroTV.News Jateng. Jumat, 11 Maret 2016. Retrieved Selasa, 22 Mei 2018 from <http://jateng.metrotvnews.com/read/2016/03/11/497384/ormas-tak-berizin-deklarasikan-diri-di-yogyakarta>

Wakhid, Ali Abdul. (2013). HUBUNGAN PEMERINTAH DAN BIROKRASI. Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013 . Lampung: Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung

Wibawa, Samodra. (1994). Kebijakan Publik : Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia

Widodo J. (2001). *Good Governance. Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Surabaya : Insan Cendekia.

Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress

World Bank, (2002). Monitoring and Evaluation; Some Tools, Methods, and Approaches. Washington: IBRD

Yayasan Bhinneka Nusantara / YBN. (2016). Polisi ‘Tidak Berdaya’ Menghadapi Ormas Intoleran. Retrieved April 6<sup>th</sup> 2016 from Redaksi Yayasan Bhinneka Nusantara <http://bhinnekanusantara.org/polisi-tidak-berdaya-melawan-ormas-ormas-intoleran/>

Yin, Robert K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods.* Fourth Edition. USA: SAGE Publications, Inc.